

## **BAB 7 PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penulis melalui penelitian ini sampai dalam satu argumen besar yang menjadi basis ketika kita mencoba untuk pahami kesimpulan yang sangat dibangun atas orientasi yang kuat akan analisis paradigma dan operasionalisasi kebijakan luar negeri Indonesia di DK PBB. Argumen besar itu adalah, bahwa peran Indonesia membangun norma di era masa kini di mana multilateralisme mengalami penurunan derajat sangatlah penting. Peran sebagai pembangun jembatan menjadi solusi utama sebagai sebuah negara *middle power* yang pada klasifikasi tekstualnya menggunakan *role conception* atau konsepnya sebagai *advocator* dari era awal kemerdekaan, hingga *enforcer* pada era masa kini. Peran tersebut tentunya dikonsepsikan dengan materialisasi aksi kebijakan luar negeri Indonesia yang telah terrestrukturisasi sebagai *middle power* yang membangun jembatan (*building bridge*). Apa yang dilakukan Indonesia tentunya tidak lain untuk mengedepankan kepemimpinan Indonesia sebagai negara berkembang, yang menyadari betul akan signifikansinya di kawasan ASEAN *vis-a-vis* Indo Pasifik, sehingga melakukan restrukturisasi kebijakan luar negeri, dari era Indonesia dikenal sebagai pemain aktif di lingkungan eksternal membangun kekuatan normatif menuju revisi status sebagai pemain aktif namun melihat kedalam serta membangun materialisasi diplomasi multilateral yang konkret.

Restrukturisasi dalam hal ini menjadi suatu gambaran, bahwa pemerintah Indonesia senantiasa berubah dalam pendekatannya dari Presiden ke Presiden, namun tetap pada acuan yang sama, yaitu sikap bebas aktif yang diturunkan dalam berbagai aksi kebijakan luar negeri, yang dalam prosesnya mengalami restrukturisasi dan di pengaruhi oleh variabel independen, dependen, dan variabel bebasnya. Diplomasi dalam hal ini dibangun berdasarkan memori masa lalu, dan restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia sendiri memiliki beberapa kesimpulan penting. Pertama, ASEAN merupakan muatan Indonesia di DK PBB untuk di sinergikan di tengah panasnya Indo

**Hino Samuel Jose, 2022**

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI  
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN  
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Pasifik secara kelembagaan, dan posisi Indonesia dalam berbagai kerangka kerja ASEAN menjadi acuan posisi Indonesia pada berbagai isu multilateral di DK PBB. Kedua, Indonesia sebagai negara *middle power* sangat melihat situasi di kawasan dan itulah yang kemudian mempengaruhi perilaku dan fungsionalitas Indonesia sebagai *middle power* di DK PBB. Ketiga, Indonesia harus senantiasa mampu menciptakan posisi membangun jembatan, dengan kebijakan luar negeri yang dapat meningkatkan *confidence*, kepercayaan internasional, dan ruang bagi Indonesia untuk mengelola kebijakan luar negerinya, membangun persepsi atas situasi di kawasan, dan menyesuaikan/ melakukan reorientasi dari situasi dalam negerinya.

Berikut ini adalah tiga hal yang menjadi kesimpulan untuk rekomendasi bagaimana Indonesia bisa mempertahankan kebijakan *middle power* sebagai *bridge builder* di forum DK PBB. Pertama, Indonesia harus mengedepankan bahwa dalam menjaga peran sebagai pembangun jembatan, Indonesia harus peka akan realita yang ada dan terus mencoba mendorong pendekatan yang lebih pragmatis dan memberikan narasi yang lebih netral dibanding narasi yang diberikan oleh *major power* pada isu yang sama. Kedua, membangun jembatan berarti bukan hanya bicara rekonstruksi realita semata di dalam forum, tetapi juga bicara bagaimana bisa memberikan *confidence* untuk semua pihak melalui peran yang di mana Indonesia menjadi *lead* bahwa Indonesia harus terus membangun solidaritas negara berkembang, bahwa aktor di lapisan kedua inilah yang memastikan keberlangsungan multilateralisme di suatu institusi ketika *major power* tersendat. Ketiga, Indonesia diharapkan kembali terus merencanakan aksi nasional dan kerangka domestik yang dapat mendorong solidifikasi prinsip sebagai pembangun jembatan agar terkodifikasi menjadi mandat ketika melangsungkan diplomasi. Karena peran sebagai pembangun jembatan niscaya menjadi turunan politik bebas aktif yang harus dipatuhi oleh semua pemimpin Indonesia, karena Indonesia sudah belajar dari masa yang terlalu pro ke barat pada era Soeharto dan pro ke timur pada era Soekarno. DK PBB sendiri akan senantiasa terus melaksanakan kegiatannya dan Indonesia hingga saat ini harus memaksimalkan

**Hino Samuel Jose, 2022**

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI  
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN  
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

undangan – undangan untuk memberikan pandangan di DK PBB. Hal ini sebagai bentuk wujud *norm entrepreneurship* Indonesia yang unik dan tidak dimiliki negara ASEAN lainnya.

## **B. Rekomendasi Kebijakan**

Beberapa rekomendasi kebijakan yang penulis ajukan berdasarkan penelitian ini dalam kacamata praktisi dan akademisi digabungkan adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia harus melakukan antisipasi dengan menyusun prediksi/ asesmen internal terkait kelanjutan diplomasi multilateral Indonesia sebagai pembangun jembatan pasca era Presiden Joko Widodo. Kementerian Luar Negeri bisa melihat situasi terkini dan prediksi situasional politik luar negeri Indonesia lima tahun kedepan dengan berkaca dari tiga hal: (1) situasi kawasan Indo Pasifik; (2) persepsi dan tuntutan publik terkait arah strategis diplomasi Indonesia; dan (3) kesempatan apakah Indonesia pada lima tahun kedepan norma dan isu apa saja yang akan menjadi perhatian baru komunitas internasional pada spektrum geopolitik, keamanan non tradisional, dan generasi baru konflik antar negara maupun dengan aktor bukan negara.
2. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai institusi penjuror penyelenggara hubungan luar negeri harus melakukan lebih banyak kegiatan diplomasi publik yang mengenalkan peran Indonesia sebagai pembangun jembatan dan prinsip turunan lainnya dari prinsip utama bebas aktif. Diharapkan juga ada sosialisasi kepada akademisi mengenai hal ini agar semua pengkaji studi HI bisa memiliki kesamaan referensi dan pandangan apa yang pemerintah Indonesia maksud dalam diplomasi multilateral *middle power* dalam masa kini.
3. Pemerintah Indonesia saat ini agar memaksimalkan sisa waktu dua tahun lagi untuk kembali meningkatkan kerja sama multilateral dalam isu politik

**Hino Samuel Jose, 2022**

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

keamanan karena perkembangan dunia saat ini menunjukkan bahwa isu *high politics* masih menjadi perhatian utama. Apabila politik tidak kuat maka ekonomi tidak bisa berjalan begitu juga sebaliknya interdependensi ekonomi akan menentukan situasi politik. Harus ada kerangka kebijakan yang ejal dan dapat digunakan sebagai pedoman dasar posisi Delri dalam forum multilateral ketika membahas isu strategis yang memiliki *divide* atau perpecahan yang kuat antar negara agar narasi Delri mengedepankan peran pembangunan jembatan ini.

4. Mempertimbangkan lagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada jangka waktu sepuluh tahun kedepan. Indonesia juga harus tetap mendorong agenda reformasi DK PBB dan melihat apabila ada kesempatan bagi Indonesia menjadi anggota tetap DK PBB dalam jangka panjang apabila perluasan keanggotaan dimungkinkan.
5. Kesempatan bagi Indonesia akan terus ada dan reputasi politik bebas aktif menjadi kunci utama dalam memahami bahwa dunia membutuhkan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu dorong persatuan para aktor penting di masing – masing kawasan selain daripada pendekatan bilateral, GNB, maupun sesama negara ASEAN.
6. Isu Palestina, keamanan siber, kejahatan transnasional, isu krisis kesehatan, dan kerja sama pembangunan kelak akan menjadi bagian penting dalam nexus keamanan dan diplomasi dalam hubungan internasional termasuk di DK PBB kedepan. Indonesia harus siapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan instrumen Peraturan Menteri Luar Negeri terkait untuk memperbaharui struktur unit kerja di Kementerian Luar Negeri kedepan agar tetap tercakup dan mendapat mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur sambil mendorong semangat reformasi birokrasi.
7. Kesenambungan politik luar negeri Indonesia sebagai pembangun jembatan hanya bisa dicapai apabila Indonesia sadar akan keterbatasan yang mungkin terjadi karena faktor kepemimpinan dan preferensi cara penanganan situasi di

**Hino Samuel Jose, 2022**

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI  
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN  
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

kawasan serta penggunaan referensi rezim perdamaian dan keamanan di kawasan sebagai posisi multilateral di DK PBB.

8. Temuan analisis diharapkan dapat ditindaklanjuti untuk memberikan solusi yang aktual.

### **C. Saran**

Beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti untuk penelitian berikutnya:

1. Agar mengkaji secara teknis mengenai mekanisme kerja DK PBB dalam tataran lebih kebawah lagi karena penelitian ini masih fokus pada tataran strategis.
2. Mendorong agar kajian DK PBB juga terus mengedepankan hasil – hasil pertemuan dan tidak hanya prediksi saja untuk penelitian terkait berikutnya.
3. Melakukan perbaikan/ pembaharuan terhadap penelitian ini dengan mendorong studi lapangan yang lebih komprehensif terkait posisi Indonesia pada berbagai level pertemuan multilateral.

**Hino Samuel Jose, 2022**

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI  
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN  
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]